

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap *return* yang akan diperoleh investor/ pemegang saham telah banyak dilakukan. Hardikasari (2011) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2007”. Tri Purwani (2010) melakukan penelitian “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaana”. Dengan pengukuran kinerja EVA Momentum.

Yosep Yos Sudarso Anastasio Rany dan Gerinta Wirawan Yasa (2010) dengan penelitian “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap *Return On Equity* (ROE)” dengan kesimpulan, penerapan *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan yang diproksi dengan ROE. Winda Nurhidayati (2011) dengan penelitian “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan LQ45” ayu Novi Tisnantari dengan penelitian “Pengaruh *Corporate Governance* Pada Hubungan Pergantian *Chief Executive Officer* Dengan Kinerja Perusahaan”. *Corporate Governance* yang diproksi dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan secara statistik pada hubungan pergantian CEO dengan kinerja Perusahaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan hal yang mendasari untuk memahami konsep *corporate governance*. Teori agen ini dikembangkan oleh Michael Johnson, yang mengandung bahwa manajemen (*agent*) perusahaan akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Teori agen dipandang lebih luas karena karena teori dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran tentang *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan telah dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai dan ketentuan yang berlaku Wolfensohn, (1999) dalam Hardikasari (2011).teori keagenan akan muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Seorang manajer akan lebih mengetahui tentang keadaan perusahaan dibanding dengan pemilik. Manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik. Akan tetapi terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di perusahaan, konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dengan pemilik akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, dan biaya yang disebabkan karena mempunyai nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk "*bonding expenditures*" yang

diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Selain *agency cost*, konflik yang terjadi antara manajemen dengan pemilik juga bisa memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba. Prespektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dengan dengan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Teori agensi juga menjelaskan tentang timbulnya manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan. Sebuah perusahaan pasti terdapat seorang manajer dan seorang pemilik. Dan seorang manajer memiliki tanggung jawab yang lebih banyak terhadap perusahaan. Manajer harus dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan yang dihasilkan akan dialporkan kepada pemilik, dengan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu didalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan tersebut dan kepentingan bagaimana memegang tanggung jawab yang besar, maka akan dapat imbalan yang besar juga, yaitu untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Eisenhardt (1989) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*). (2) manusia memiliki daya

pikir terbatas mengenai persepsi mendatang (*bounded*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk avarese*). Berdasarkan asumsi sifat manusia dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia dan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya Haris (2004) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007).

Tujuan utama dari adanya teori agensi yaitu untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang bertujuan untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya dari informasi kurang simetris dan kondisi yang mengalami tidak kepastian. Teori keagenan ini juga untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda, dalam melaksanakan tujuan perusahaan.

Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak anatra *principal*/ pemegang saham/ pemilik dan manajer / direksi. menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interst*). *Agency theory* memfokuskan kepada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan *principal* dengan *agent* (Prasetyantoko 2008:68).

Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Kaen (2003) dala Siallagan (2006) menyatakan *corporate gocevernanace* pada dasarnya menyangkut masalah siapa (*who*) yang seharusnya mengendalikan jalanya kegiatan korporasi dengan mengapa (*why*) harus dilakukan

dengan pengendalian dengan jalanya korporasi. Yang dimaksud dengan siapa adalah pemegang saham, sedangkan “mengapa” adalah karena adanya hubungan antara pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan. Yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana bisa para investor menyakinkan bahwa manajer untuk memberikan keuntungan bagi mereka, bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan kepada proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor. Dan *corporate governance* juga berkaitan dengan bagaimana investor mengontrol para manajemen (Shleifer dan Vishny, 1997 dalam Sabbrina, 2010). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekankan atau menurunkan biaya keagenan.

2.2.2 Pengertian Corporate Governance

Corporate governance akan muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau sering kali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan. *Corporate governance* merupakan tata

kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipasi dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan.

Corporate governance menurut Komite Cadbury adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antarkekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajemen, pemegang saham, dan sebagainya. *Cadbury Commite* adalah seperangkat yang merumuskan hubungan pemegang saham, manjer, kreditor, pemerintah karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak tanggung jawab mereka (Surya dan Ivan Yustiavanda 2006.24).

Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antar pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien (Surya dan Ivan Yustiavanda 2006, 25).

Menurut keputusan menteri badan usaha Milik Negara Nomor KEP-117M-MBU/2002, *corporate governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang dan nilai-nilai etika. Adapun tujuan akhir dari penerapan sistem ini adalah untuk menaikkan saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya (Surya dan Ivan Yustiavanda 2006:25).

Menurut Price Waterhouse Coopers, *corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisai, nilai-nilai sistem, berbagai proses, kebijakan-kebjikan struktur organisai yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efesiensi, dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan *stakeholder* (Surya dan Ivan Yustiavanda 2006, 26).

Dari definisi pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* yaitu:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan juga pengukuran kinerjanya.

Mekanisme-mekanisme *corporate governance* terdiri dari:

1. Kepemilikan manajerial

2. Kepemilikan institusional
3. Dewan komisaris
4. Proporsi dewan komisaris independen
5. Komite audit

Aspek-aspek penting dari *corporate governance* yang perlu dipahami dalam perusahaan agar dapat bersaing dalam dunia bisnis adalah :

1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan diantaranya rapat umum pemegang saham (RUPS), komisaris dan direksi.
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*.
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan.
4. Adanya perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang materiil dan relevan.

Secara umum, penerapan *corporate governance* secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan yaitu:

1. Memudahkan akses untuk investasi domestic maupun asing.
2. Dapat *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri *stakeholder* terhadap perusahaan.

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau penentuan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemakai penting lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri Gunarsih, 2003 dalam Hardikasari, 2011). Selain hal tersebut *corporate governance* mempunyai manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
5. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Hubungan antara *corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan bukan sesuatu yang secara universal dapat langsung diterima, walau saat ini masih banyak ada pengakuan yang luas bahwa pembentukan *corporate governance* secara substansi dapat mempengaruhi pemegang saham. Mckisey dan Co (2002) dalam Hardikasari (2011) melakukan survey yang hasilnya menunjukkan bahwa

para investor cenderung menghindari perusahaan-perusahaan dengan predikat buruk dalam *corporate governance*. Perhatian yang diberikan investor terhadap *corporate governance* sama besarnya dengan perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Para investor yakin bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* telah berupaya untuk meminimalkan risiko keputusan yang salah akan menguntungkan bagi diri sendiri, sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang pada akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan *corporate governance* adalah untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kinerja perusahaan, sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.

2.2.3 Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan

Perusahaan adalah suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu yang menunjukkan apa yang diinginkan oleh anggotanya. Sedangkan pengertian kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksana tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Pelaporan kinerja perusahaan merupakan suatu kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja dari semua aktivitas perusahaan dan sumber daya yang dipertanggung jawabkan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari hasil laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja keuangan perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi (Simanjutak 2005, h.1).

Kinerja perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2003 dalam Sabbrina, 2010). Menurut Febryani dan Zulfadin (2003) dalam Cornelius (2007) kinerja perusahaan merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menelaskan operasionalnya (Payatma, 2001 dalam Sabbrina, 2010).

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari berbagai indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, dan pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan ini bermanfaat bagi investor, kreditor, dan calon investor. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. Dengan melalui penilaian kinerja maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya.

Dalam melaksanakan kinerja perusahaan, pasti terdapat evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seorang atau kelompok orang atau unit-unit kerja dalam perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan untuk memberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan suatu imbalan atau penghargaan kepada para karyawan. Setiap orang

pasti memiliki keinginan untuk berprestasi dan mengarpakan prestasinya tersebut diketahui dan dihargai orang lain. Dan orang tersebut akan selalu berusaha mempertahankan prestasinya, karena orang tersebut merasa bahwa prestasinya dapat diterima dan dihargai oleh orang lain atau dalam perusahaan, prestasi pekerja, atau karyawan dapat diterima dan dihargai oleh atasannya.

Evaluasi kinerja juga disebut sebagai penilaian prestasi kerja yang merupakan bagian dari fungsi manajemen yang penting yaitu evaluasi pengawasan. Evaluasi kinerja sekarang ini merupakan keharusan, dan sudah terus menerus dilakukan, terutama dengan melibatkan pelanggan. Para pelanggan sering meminta memberikan evaluasi misalnya terhadap kualitas dari sikap karyawan dalam memberikan pelayanan. Sebagai bagian dari fungsi manajemen, proses evaluasi kinerja mengikuti tahapan perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi (Simanjutak, 2005:104 dalam Hardikasari, 2011).

Evaluasi kinerja atau yang disebut juga sebagai penilaian kinerja yang dilakukan dalam perusahaan, mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pendapat yang wajar atas penyertaan dalam perusahaan untuk mewujudkan bahwa perusahaan bernilai lebih dari apa yang ada didalam neraca.
2. Untuk keperluan merger dan akuisisi yaitu untuk mengetahui beberapa nilai perusahaan dan nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan.
3. Untuk kepentingan usaha yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai usaha lebih besar dari pada nilai likuiditasnya.

4. Memperoleh pembelanjaan penetapan besarnya pinjaman atau tambahan modal.
5. Untuk menjamin pencapaian sasaran atau tujuan perusahaan.

Evaluasi kinerja perusahaan dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan, terutama bila terjadi ketelambatan atau penyimpangan. Dan evaluasi kinerja juga dimaksud untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui keterlambatan dan penyimpangan harus segera diperbaiki, sehingga sasaran dan tujuan dapat dicapai. Hasil evaluasi kinerja dapat digunakan untuk menyusun rencana kerja perusahaan yang akan mendatang.

Kinerja keuangan dapat dikatakan sebagai hasil yang dicapai oleh sebuah perusahaan atas berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber keuangan yang ada. Kinerja keuangan dapat dilihat dari analisis laporan keuangan atau analisis rasio keuangan. Menurut Aref habib (2008:91) bahwa “kinerja keungan diukur dengan banyak indikator, salah satunya adalah analisis rasio keuangan”. Untuk melakukan analisis rasio keuangan tersebut diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu rasio keuangan diperoleh dari menghubungkan dua atau lebih data keuangan.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berisis tentang keadaan keuangan perusahaan yang bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Menurut Munawir (2000:2) mengemukakan bahwa “laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai

alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau efektifitas perusahaan tersebut”. Menurut Bambang Riyanto (2001:327) : “laporan keuangan (*financial statement*) memberikan ikhtisar mengenai keadaan financial suatu perusahaan, dimana neraca (*balance sheet*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan laba rugi (*income statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun”.

Laporan keuangan perusahaan merupakan alat untuk penilai kinerja perusahaan, laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu (biasanya ditunjukkan dalam periode atau siklus akuntansi), yang menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral laporan keuangan. Menurut Munawir (2000:31) “laporan keuangan merupakan alat sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan”.

Setiap penanam pasti menginginkan keuntungan dari dana yang telah diinvestasikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk menentukan

pada perusahaan mana ia akan berinvestasi. Menurut Anoraga dan Pijipakarti (2006:60) “hal-hal yang diperhatikan investor adalah kinerja perusahaan, perkembangan industri dimana perusahaan berada, kondisi mikro dan makro ekonomi”. Kinerja keuangan dapat dikatakan sebagai hasil yang dicapai perusahaan atas berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber daya keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari analisis laporan keuangan atau analisis rasio keuangan.

Menurut Robert Ang (1997:13-24) kinerja keuangan dapat ditinjau dari lima pendekatan yaitu:

1. Kinerja likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Baik buruknya kinerja likuiditas suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio likuiditasnya (*liquidity ratios*), rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber jangka pendek untuk memenuhi kewajiban tersebut. Perusahaan yang mampu memenuhi hutangnya tepat pada waktu jatuh tempo, maka perusahaan tersebut berada dalam keadaan likuid. Hal ini dapat dicapai apabila perusahaan tersebut memiliki aktivitas lancar yang lebih besar dari pada utang lancar atau utang jangka pendek. Rasio likuiditas mempunyai keterkaitan dengan rasio solvabilitas. Perusahaan yang terus menerus dengan keadaan yang tidak likuid, kewajiban jangka pendeknya akan menumpuk. Tumpukan kewajiban jangka pendek ini akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang (*solvable*). Perusahaan yang *insolvable* mengandung resiko yang tinggi untuk

ditanami investasi, karena perusahaan yang tidak mampu membayar hutang akan disita kepemilikan hartanya.

2. Kinerja aktivitas, yaitu kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki atau peraturan (*turnover*) dari aktiva-aktiva tersebut. Kinerja aktivitas dapat diketahui dengan melihat rasio aktivitas (*activity ratios*) perusahaan. Rasio aktiva ini juga disebut *asset activity ratios* dan *turnover ratios*.
3. Kinerja probabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Para investor dan analisis sangat memperhatikan kinerja profitabilitas karena berkaitan dengan harga saham dan deviden perusahaan, sehingga dapat diperoleh informasi tentang jumlah profit yang diperoleh dari investasi yang telah ditanam. Kinerja profitabilitas dapat dilihat dari rasio profitabilitas (*profitability ratios*) yang merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan kombinasi dari efek rasio likuiditas, manajemen aktiva, dan utang-utang pada hasil operasi. Rasio profitabilitas dapat dilihat dari kesuksesan dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dalam produksi. Dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dari suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio berarti semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
4. Kinerja solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk melihat baik buruknya kinerja solvabilitas suatu perusahaan, kita dapat memperhatikan rasio solvabilitas (*solvency ratios*)

rasio solvabilitas disebut *leverage ratios*, karena merupakan rasio pengungkit yaitu menggunakan pinjaman untuk memperoleh keuntungan. Dengan rasio solvabilitas, dapat diketahui perhubungan penggunaan dana perusahaan yang berasal dari pihak luar atau pinjaman. Suatu perusahaan dikatakan dalam keadaan *solvable* apabila perusahaan mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya apabila jumlah aktiva yang tersedia tidak cukup atau lebih kecil dari jumlah utangnya, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan *insovable*.

5. Kinerja pasar yaitu, kemampuan perusahaan dalam mengembangkan nilai pasar sahamnya jika dibandingkan dengan nilai rata-rata pasar industri yang sama. Kinerja pasar ini dapat dilihat dari rasio pasar (*market ratios*) suatu perusahaan. Pendekatan penilaian nilai pasar didasarkan kepada perkiraan laba perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat diketahui beberapa investasi suatu saham akan kembali.

Melihat laporan keuangan suatu perusahaan akan tergambar didalamnya aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan juga digunakan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan. Penilaian kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang kompleks

karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta kemana dari berbagai tuntutan yang timbul terhadap perusahaan.

Jadi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu ukuran atau tolak ukur tertentu. Biasanya ukuran yang digunakan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan. Adapun jenis perbandingan dalam analisis rasio keuangan meliputi dua bentuk yaitu membandingkan rasio masa lalu, saat ini ataupun masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Dan bentuk yang lainnya yaitu dengan perbandingan rasio antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Rasio yang digunakan dalam perbandingan dalam penelitian ini adalah *Return On Equity* (ROE).

Analisis rasio akuntansi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, adalah *Return On Equity* (ROE), ROE merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dengan ekuitas yang dimiliki (Fred, dkk., 2001: 67). Rasio yang paling penting, atau “jumlah akhir” (*bottom line*), adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa, yang diukur sebagai tingkat pengembalian ekuitas saham biasa (*return on common equity-ROE*). Eugene F. Brigham Dan Joel F. Houston (109). Rasio ini menggunakan hubungan antara keuangan setelah pajak dengan modal sendiri yang digunakan perusahaan. Yang disebut modal sendiri adalah saham biasa, agio saham, laba ditahan, saham prefen dan cadangan-cadangan lainnya. Melihat hubungan-hubungan tersebut, ROE tidaklain adalah rentabilitas ekonomi. Bagi perusahaan umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting dari pada masalah laba, karena

laba yang besar saja belum merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah bekerja dengan efisien Riyanto (2000) dalam Juwita (2012). *Return On Equity* diperoleh dari *Net Incom After tax* dibagi *Equity*. Hasil pembagian ini pada umumnya dinyatakan dalam persen. Semakin tinggi rasio ini menandakan kinerja keuangan perusahaan semakin baik atau efisien, nilai *equity* perusahaan akan meningkatkan dengan peningkatan rasio ini. ROE yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \text{Net Incom After Tax} / \text{Total Equity} \times 100\%$$

Keterangan : *Net income after tax* adalah laba setelah pajak

Total equity adalah total modal sendiri

Semakin besar rasio ROE menunjukkan kenaikan laba bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Ada hubungan yang positif antara ROE dengan harga saham perusahaan yang dapat meningkatkan nilai buku perusahaan (Higgins, 1998) dalam Juwita (2012).

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3.1 Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Sujono dan Alddrige (2005) dalam Susilo (2010). Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau manajer sekaligus sebagai pemegang saham. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi yang penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan. Adanya kepemilikan manajerial akan menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*, hubungan antara manajer dengan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara *agent* dan *principal*. *Agent* diberi modal oleh *principal*, untuk menjalankan bisnis demi kepentingan *principal*. Keputusan yang diambil manajer untuk memaksimalkan sumber daya (*utilitas*) perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1979) dalam Susilo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang merupakan dirinya sendiri. Kepemilikan manajerial merupakan program kebijakan untuk mengurangi masalah keagenan.

Gunarsih (2004) dalam Sabbrina (2010) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari pemegang saham. Ross et al., (2004) dalam Sabbrina (2010) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan sahampada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan saham yang lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatu kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari

keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faisal, 2005 dalam Nurhidayati 2010). Peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi akan menurunkan kecenderungan adanya tindakan manipulasi yang berlebihan, sehingga dapat menyatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Menurut Faisal (2005) dalam Nurhidayati (2010), besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruence*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan. Sehingga manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari pemegang saham.

Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam Nurhidayati (2010) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial yang mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham akan memperoleh manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang khususnya adalah dirinya sendiri. Jumlah kepemilikan saham manajerial yang besar seharusnya seharusnya memiliki kinerja yang lebih tinggi, karena *agency cost* yang berkurang.

Jadi hipotesis yang pertama diajukan sebagai berikut:

H1 : kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3.2 Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan perusahaan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Nurhidayati (2010) kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*). Cruthely dan Hansen (1989), Bathala *et al.*(1994) dalam Nurhidayati (2010) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Presentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Budiono, 2005). Menurut Bushee (1998) dalam Kusumawardhani (2012) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insetif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Kouki dan Guizani (2009) dalam Kusumaningtyas (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang besar merupakan cara untuk mengawasi manajer. Peningkatan kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost* atas

debt dan *insider ownership* karena semakin besar kepemilikan institusional maka dapat mengurangi terjadinya konflik antar kreditur dan manajer dan akhirnya dapat menekan biaya keagenan.

Cornertt *et al* (2006) dalam Kusumaningtyas (2012) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh kepemilikan institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja keuangan perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri. Balsam *et al.* (2002) dalam Kusumaningtyas (2012) menemukan adanya hubungan negatif antara *discretionary accrual* yang tidak diekspektasi dengan imbal hasil saham yang disekitar tanggal pengumuman, dimana hubungan negatif tersebut bervariasi tergantung tingkat kecanggihan investor, dimana reaksi pasar dan investor yang lebih mendahului investor yang tidak canggih.

Brous dan Kini (1994) Nurhidayati (2010) menyatakan bahwa ketatnya pengawasan yang dilakukan investor institusional tergantung pada investasi yang dilakukan. Adanya pemegang institusional memiliki arti penting memonitori manajemen. Tindakan pengawasan oleh investor institusional mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga akan mempengaruhi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri. Namun, apabila struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh dewan komisaris dan direksinya maka dewan tersebut justru akan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan secara pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Porter (1992), Mudiastuty dan Mas'ud Mahfoed (2003) dalam Sekaredi (2011) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin efektif mekanisme kontrol terhadap kinerja manajemen. Pendapat ini didukung Barclay dan Holderness (1990) dalam Trisnantari (2010), yang menemukan pengaruh positif signifikan tingkat kepemilikan institusional dalam jumlah besar terhadap nilai perusahaan.

Jadi hipotesis yang kedua yaitu:

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3.3 Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya, maka pada akhirnya manajer akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal bagaimana mereka mengalokasikan dana investor. (Jensen & Meckling, 1976; Shleifer dan Vishny, 1997) dalam Wardhani (2006). Mizruchi (1983) dalam Wardhani (2006) menjelaskan bahwa dewan merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang (Louden, 1982) dalam Wardhani (2006).

Jensen (1983) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Hardikasari (2011) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris bagian dari mekanisme *corporate governance*. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Allen

dan Gale (2000) dalam Hardikasari (2011) yang menegaskan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting. Mereka juga menyarankan bahwa dewan komisaris yang ukurannya besar kurang efektif dari pada dewan ukurannya lebih kecil.

Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak berkurangnya investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab menyampaikan informasi yang terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2000) dalam Sekaredi (2011) fungsi dewan komisaris adalah untuk memastikan sebuah perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kebutuhan pemegang sahamnya baik dengan memonitori keefektifan praktek *corporate governance* (*National Code For Corporate Governance*, dikutip dari IGRA, dalam Sekaredi, 2011).

Penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beasley (1996), dan Jensen (1993) dalam Hardikasari (2011) menyimpulkan bahwa dewan komisaris berukuran besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Dengan tingkat pengawasan yang baik akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena manajemen akan bertindak sesuai yang diharapkan pemegang saham dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.

Jadi hipotesis yang ketiga yaitu :

H3 : ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3.4 Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan lainya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Untuk menetapkan efektivitas komisaris independen, jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan ditetapkan paling tidak 30% dari jumlah seluruh komisaris atau paling sedikit satu orang.

Dalam menjalankan tugasnya, komisaris independen memiliki misi yang ditetapkan oleh *Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam pedoman umum *corporate governance* Indonesia (2006) yaitu:

1. Misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) diantara berbagai kepentingan perusahaan dan kepentingan para pemegang saham sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.
2. Komisaris independen harus mendorong diterapkanya prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada perusahaan diIndonesia.

Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Didalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam pedoman umum *corporate governance* Indonesia menurut *Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance* (2006) dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan dewan komisaris melakukan pengawasan dan memebrikan nasihat kepada direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk didalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
- b. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit, yang bekerja dengan baik.
- c. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan organisasinya.
- e. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

- f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan semakin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993) dalam Hardikasi (2011). Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan adanya *agency problem* (masalah keagenan), yaitu makin banyak anggota dewan komisaris akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan berkomunikasi, dan mengkoordinir kinerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajer, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack 1996, Jensen 1993) dalam Hardikasari (2011).

Fama dan Jensen (1983) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive* (komisaris independen) bisa bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memeberikan nasehat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan monitoring agar terciptanya perusahaan yang *good corporate governance*.

Yang *et al.* (2006) dalam Puspitasari dan Ermawati (2010) meneliti jumlah komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan dan usaha. Hasil penelitian tersebut adalah ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini mendukung penelitian Sanda *et al.* (2005) dalam

Puspitasari (2010) jumlah komisaris independen yang terlalu besar akan menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena keputusan yang diambil harus didiskusikan terlebih dahulu dan diambil dari semua dewan komisaris. Selain itu, keputusan tidak bersifat dinamis, karena untuk mengubah keputusan yang telah diambil, membutuhkan waktu yang lama untuk berunding dan memperoleh kesepakatan bersama.

Jadi hipotesis yang keempat yaitu;

H4 : Proporsi dewan komisaris independe berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3.5 Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab membantu auditor dalam mempertahankan independenya dari manajemen. Sesuai dengan kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dengan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Tujuan utama dibentuknya komite audit didalam perusahaan adalah untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, obyektivitas, dewan komisaris, dan dewan direksi.

Manfaat komite audit bagi perusahaan yaitu :

1. Memperbaiki kualitas pelaporan keuangan.

2. Memungkinkan dewan komisaris untuk memberikan penilaian yang independen atas kinerja keuangan perusahaan.
3. Memperkuat posisi auditor eksternal dalam memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Memperkuat independensi dan obyektivitas auditor internal.
5. Meningkatkan keyakinan publik, khususnya investor, terhadap perusahaan.

Dalam bukunya Alijyo (2004: 98) menjelaskan bahwa gagasan dasar dalam penentuan komite audit adalah untuk memberdayakan fungsi komisaris dalam melakukan pengawasan. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik. BEI mewajibkan perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen tiga orang diantaranya yaitu: komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit, sedangkan pihak lain adalah pihak ekstern yang independen yang minimal salah seorang memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, megawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings manajemen*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Agar komite audit dengan berbagai pihak dapat berjalan dengan lancar, maka anggota komite audit perlu memiliki kemampuan yang cukup *qualified*. Kualifikasi anggota (*personal qualifications*) komite audit menurut *The Treadway Commision* sebagai berikut:

- a. Independen (*independence*)
- b. Memahami aktivitas bisnis (*board bussiness knowledge*)
- c. Memiliki kemampuan komunikasi (*communication skills*), *natural curiosity* dan *healthy skepticism*.
- d. *Vigilance*.

Anggota komite audit selain ahli dibidangnya juga dituntut untuk mengetahui dan menguasai bidang akuntansi dan auditing, analisis laporan keuangan, pembelanjaan perusahaan, serta tanggap dalam segala perkembangan.

Klein (2002) dalam Siallagan (2006) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Kandungan *discretionary accruals* tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. Price Waterhouse (1980) dalam Siallagan (2006) menyatakan bahwa investor, analisis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan.

Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui:

1. Pengawasan atas pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada pelaporan keuangan yaitu:
 - a. Berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat.

- b. Berkurangnya pengungkapan akuntansi yang kurang tepat.
- c. Berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

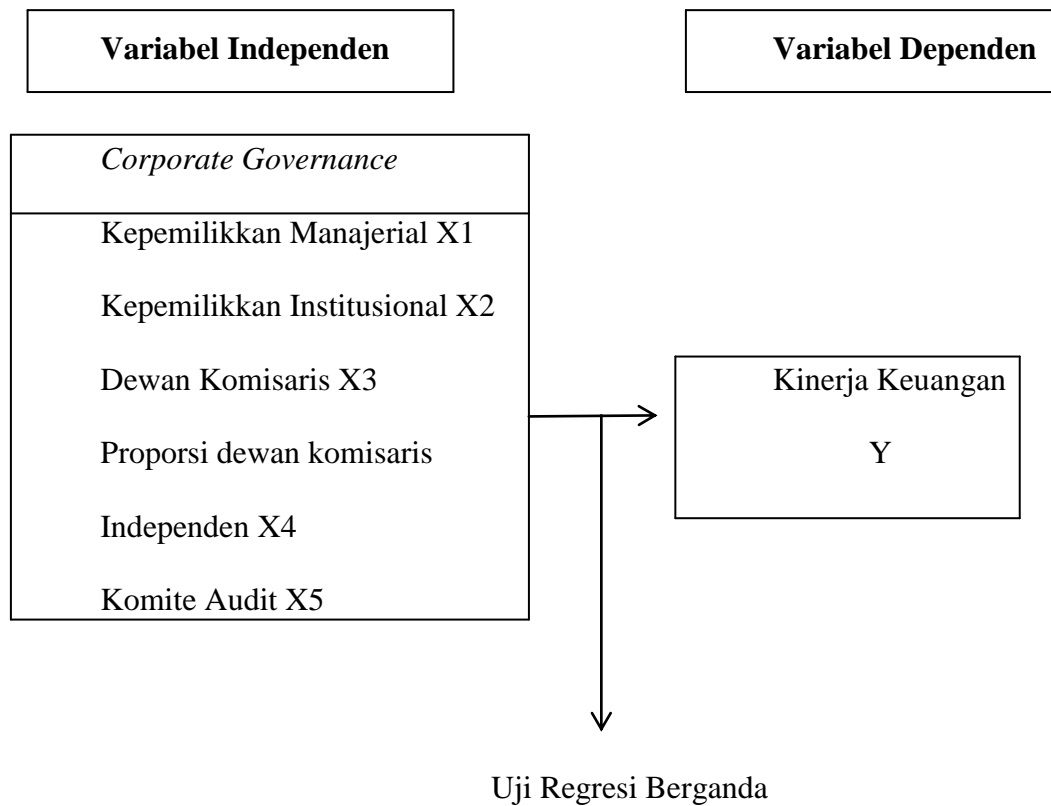
Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa komite audit mengurangi aktivitas *earning management* yang akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Menurut (Samsul dan Abdul, 1997 dalam Nurhidayati, 2011) pengetahuan anggota komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan sangat penting untuk menjalankan tugas sebagai seorang komite audit, karena dengan adanya pengetahuan komite audit dalam bidang keuangan komite audit lebih mudah untuk menerapkan fungsi pengawasan dan pelaporan terhadap perusahaan. Juga dapat mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Jadi hipotesis yang kelima yaitu:

H5 : komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Mekanisme-mekanisme *corporate governance* pada dasarnya memiliki suatu tujuan untuk memberikan suatu kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, jadi dalam penggunaan *corporate governance* dalam penelitian ini adalah sebagai variabel pemoderasi diharapkan dapat memperkuat hubungan dengan kinerja keuangan perusahaan. Aspek-aspek *corporate governance* yang memoderasi dengan kinerja keuangan perusahaan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti bahwa mekanisme *corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.